
SISTEM PEMERINTAHAN DAN POLITIK YANG DITERAPKAN DI KERAJAAN MAJAPAHIT (DIBAWAH KEPEMIMPINAN RAJA HAYAM WURUK)

Muhammad Nurun ‘ Ala Nur1, Fahrudin2*
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Yogyakarta
Email:
alanyklol123@gmail.com
fahrudin@upy.ac.id

Abstract

Majapahit was a kingdom based in East Java, Indonesia. Why can you say that, because when viewed from the legacy of Majapahit which is entirely located in East Java, especially in Trowulan Mojokerto which is concrete evidence of the existence of the Majapahit kingdom. The Majapahit Empire has developed an orderly system of government in terms of politics and government. The Majapahit Kingdom under the leadership of King Hayam Wuruk can indeed be said to be prosperous, but apart from that it can also be said to have almost slumped, almost collapsed here in the sense that it was almost destroyed because of internal and external rebellions. clear with a decentralized system and a rigid bureaucracy. The king is considered the incarnation of a god and is the supreme ruler and sits at the top of the hierarchy of power assisted by government bureaucratic officials. Central - regional government structure is very tight.

Keywords : Majapahit, Political system, government system, implementation of political programs

Abstrak (Indonesia Version)

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Kenapa bisa dikatakan demikian, karena bila dilihat dari peninggalan Majapahit yang keseluruhannya berada di Jawa Timur khususnya di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti kongkrit adanya kerajaan Majapahit. Kerajaan majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dalam hal politik dan pemerintahan. Kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk memang bisa dikatakan makmur, tetapi diluar itu juga bisa dikatakan hampir terpuruk, hampir terpuruk disini dalam artian hampir hancur karena terjadi pemberontakan Internal dan Eksternal Majapahit telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang menganut doktrin cosmoginos di mana kekuasaan memiliki territorial yang jelas dengan sistem desentralisasi dan birokrasi rigid. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan merupakan penguasa tertinggi dan menduduki puncak hirakhi kekuasaan dibantu oleh pejabat birokrasi pemerintahan. Struter pemerintahan pusat – daerah sangat rapat.

Kata kunci : Majapahit, Sistem politik, sistem pemerintahan, pelaksan program politik

DOI : -

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Received | : | |
| Accepted | : | |
| Published | : | |
| Copyright Notice | : | Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of |

the work's authorship and initial publication in this journal.



1. LATAR BELAKANG

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Budha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negarakertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatra, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia timur, sementara wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal lahir kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 M tahun yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 M. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana (Wahyudi 2013).

Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sebagai seorang Raja besar, Raden Wijaya memperistri empat putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara, sedangkan dari Gayatri, Raden Wijaya mempunyai dua orang putri, yaitu Tribuanatungadewi dan Rajadewi Maharajasa (Wahyudi 2013).

Majapahit juga merupakan suatu kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Kenapa bisa dikatakan begitu?, karena bila dilihat dari peninggalan Majapahit yang keseluruhannya berada di Jawa Timur khususnya di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti kongkrit adanya Kerajaan Majapahit. Kota Trowulan yang sekarang ini bisa membuktikan bahwa posisi saat ini Kota Trowulan sendiri sangatlah strategis yang dapat diakses melalui jalur darat maupun jalur air. Dan letak Trowulan yang berada di daerah yang relatif datar dan dekat dengan pusat Kerajaan terdahulu seperti Kediri, Singhasari, Jenggala, dan Panjalu (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005). Sehingga dapat memungkinkan terjadinya kontak antara daerah-daerah tersebut, baik untuk kepentingan perdagangan, sosial budaya, maupun politik. Dan sejatinya kota ini letaknya tidak terlalu jauh dari kota pelabuhan seperti Surabaya, Gresik, Tuban, dan Pasuruan (Adrisijanti 2012).

Sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit, Singhasari telah menjadi Kerajaan paling kuat di Jawa. Majapahit secara umum dapat dianggap sebagai titik puncak Kebudayaan Hindu Jawa. Kertarajasa Jayawardhana atau disebut juga Raden Wijaya yang nantinya menjadi pendiri Kerajaan Majapahit sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293-1309. Dengan gelar Naraya Sanggramawijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana atau biasa juga disebut dengan gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Raden wijaya merupakan nama lazim yang dipakai para Sejarawan untuk menyebut pendiri Kerajaan Majapahit. Nama ini terdapat dalam Pararaton yang ditulis pada masa sekitar abad ke -15 (Purwadi 2010).

Setelah pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran para pasukan Jayakatwang, dan pada saat itu juga Raden Wijaya mencari perlindungan dari Aria Wiraraja yang masih setia pada Kerajaan Majapahit, pada saat Raden Wijaya datang, penyambutan yang sangat baik dilakukan oleh Wiraraja, ketika penjamuan makan ada sebuah atau salah

satu dialog panjang yang dilakukan oleh Wiraraja dengan Raden Wijaya, Raden Wijaya menyampaikan cita-citanya bahwa ia ingin menggulingkan Prabu Jayakatwang dan ingin mendirikan Kerajaan baru yang bisa menguasai Jawa. Wiraraja akan diberi setengah dari kekuasaan Raden Wijaya jika hal itu terjadi. Mendengar tersebut Aria Wiraraja menyatakan kesediaannya membantu segala usaha Raden Wijaya untuk berpura-pura menyerahkan diri ke Prabu Jayakatwang dan Wiraraja berpesan agar Raden Wijaya selama tinggal di sana untuk menyelidiki kekuatan Kediri kemudian mengajukan permohonan untuk membuka hutan atau babat alas dan tanah tandus di tarik dan dibersihkan (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005).

Dalam waktu singkat hutan, tanah, beserta lingkungan yang ingin dijadikan perkampungan dan dibuka lagi dengan nama baru yaitu Majapahit, sebuah perkampungan kecil yang rakyatnya kala itu hidup dengan sederhana. Raden Wijaya kemudian memindahkan Ibu Kota ke Trowulan, dan mendirikan Kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit dan mengambil nama Kertarajasa Jayawardhana (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006).

2. METODE

Metode Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari tahu bagaimana sistem Politik Kerajaan Majapahit di Era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Dengan menggunakan metode Studi Pustaka metode menganalisis jurnal, dokumen kesejarahan, buku, serta dengan memverifikasi beberapa jurnal yang memiliki kredibilitas yang menjelaskan tentang Sistem Politik Kerajaan Majapahit di Era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk (Nafisah, Ainin, and Tohe 2021).

Dalam melaksanakan penelitian, penulisan menggunakan metode historis. Dalam (SYAMSUDDIN and Nursam 2007). Menjelaskan bahwa penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber (heuriistik), menguji keaslian data, interpretasi dan historiografi atau menuliskan lagi menjadi yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sumber sekunder untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sistem Politik Kerajaan Majapahit di Era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan tentunya dari data sumber yang akurat dapat dijadikan kajian pada artikel ini.

Terakhir dari fokus penulisan ataupun penelitian ini yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah harus mengutamakan aspek kronologis atau kejadian (Kuntowijoyo 2013). Dalam memenuhi aspek kronologis tersebut maka penulisan artikel ini melakukan penulisan berdasarkan urutan peristiwa. Dalam pembahasan artikel secara runtut menjelaskan sistem Politik Kerajaan Majapahit Era Raja Hayam Wuruk.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Majapahit adalah kerajaan besar yang memiliki sejumlah peraturan di dalamnya, termasuk sistem Politik yang diterapkan di dalam pemerintahannya, kali ini di artikel ini

mengambil sistem politik pemerintahan Majapahit di Era Raja Hayam Wuruk. Sebelum masuk ke inti pembahasan marilah kita simak dulu bagaimana sepakk terjang maupun kehidupan dari seorang Raja yang bernama Hayam Wuruk, Hayam Wuruk adalah Raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350-1389 masehi, Setelah resmi menjadi Raja di Kerajaan Majapahit gelarnya adalah Sri Rajasanagara (Harry 2010).

Kerajaan yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1528 M ini, mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 (Purwadi, 2010). Sejarah Majapahit disebutkan dalam kitab Pararaton dan Nagarakertagama diawali dengan pembukaan hutan Tarik oleh Raden Wijaya yang terletak di Delta Sungai Brantas, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1293 (Adrisijanti 2012).

Hayam Wuruk juga merupakan Raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang memerintah, kemudian didampingi juga oleh patih yang Tangguh yakni Patih Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Dari semua itu tidak terlepas dari peran masyarakat, Raja, para bawahan, hingga militer Kerajaannya, sehingga Kerajaan Majapahit saat itu (di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk) sangat makmur dan bisa dikatakan bahagia sentosa (Marwati Djoened Poesponegoro 1984).

Nama Hayam Wuruk bermakna “Ayam Terpelajar”. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur. Dikatakan juga bahwa Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa di hadapan Ratu Tribhuwana Tungadewi saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan. Hayam Wuruk merupakan sosok pemberani dan tegas, ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa Kejayaan (Andriana Sofiarini 2018).

Di lain sisi Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Rajasanagara pada 1350 M. Hayam Wuruk dinobatkan setelah ratu Tribhuwana Tungadewi menyerahkan takhta Majapahit kepadanya, ketika menjadi Raja Majapahit, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Peran Mahapatih Gajah Mada sebagai sosok yang telah berpengalaman sangat penting dalam pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Hayam Wuruk, dan perlu diketahui bahwa Gajah Mada sudah mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil, seperti main dan latihan berburu dan mengajarkan adab etika (Haryono 1997).

Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran salah satunya adalah akibat konflik perebutan takhta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabhumi yang juga menuntut haknya atas takhta. Akhirnya munculah perang saudara yang

pertama kali yang sering disebut perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405-1406, antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana. Beralihnya kekuasaan Hindhu-Budha ke sistem kekuasaan bercorak Islam. Menurut serat kandha dan babad yang bersifat Islam yang ditulis kemudian dan Menurut cerita, peristiwa direbutnya kota kerajaan kuno Majapahit oleh orang Islam pada 1527 M (Sofyan 2010).

Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit di Bawah Kepemimpinan Raja Hayam Wuruk

Kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk memang bisa dikatakan makmur, tetapi diluar itu juga bisa dikatakan hampir terpuruk, hampir terpuruk disini dalam artian hampir hancur karena terjadi pemberontakan Internal dan Eksternal. Pada waktu pemerintahan masih berada di tangan Tribhuwanattunggadewi, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi raja muda (rajakumara). Dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Wisnuwarddhani atau Tribhuwanattunggadewi jayawismuwarddhani disebutkan bahwa Dyah Hayam Wuruk menjadi penguasa di Jiwana (jiwanarajnapratistita dyah Hayam Wuruk bathara sri ra (jasanagara) nama rajabhiseka). Pada tahun 1350 Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit bergelar Sri Rajasanagara (Haryono 1997).

Selama pemerintahannya yang berakhir pada tahun 1389 (ia meninggal pada tahun tersebut), kerajaan Majapahit mencapai puncak kebesaran. Hal ini tidak lepas dari peranan sang Mahapatih Gajah Mada yang mendampingi sebagai Patih Hamangkubhumi. Usaha-usaha Hayam Wuruk selama pemerintahannya adalah meningkatkan kemakmuran rakyat dengan berbagai usaha dan tindakan nyata (Slamet Mulyana 1979). Raja Hayam Wuruk juga saat bertakhta sangat tegas dengan cara membuat kebijakan kerajaan yaitu Menggalakkan Kejahatan, terutama politik adu domba yang dilakukan pihak Internal dari kerajaan Majapahit. Selain itu Hayam Wuruk juga tidak mengambil upeti dari rakyat dia berusaha semampu mungkin untuk berusaha untuk sama sekali tidak mengambil upeti dikarenakan itu adalah hak gaji untuk masyarakat bukan untuk raja, raja hanya bertugas mengatur sistem pemerintahan dan mensejahterakan masyarakatnya terutama di lingkup kerajaan Majapahit (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006).

Kejayaan Majapahit, bebarengan dengan berkembangnya potensi alam, sumberdaya manusia, potensi kekuatan armada perang, serta ajaran Hindu yang sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat serta tata pemerintahan di Majapahit, hal itu ditambah lagi dengan banyaknya upeti dan pajak yang diperoleh Kerajaan Majapahit dari kerajaan-kerajaan yang telah ditaklukan, penguasaan-penguasaan tersebut telah membawa Kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar yang disegani di Semenanjung Asia tidak lepas juga dari era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk beserta Patih Gajah Mada dan para prajurit patuhnya (Yusuf Adam 2013).

Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan jazirah malaka mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah

Palapa yang dinyatakan Gajah Mada pun terlaksana, dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, ditambah Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain itu kerajaan ini dibawah kepemimpinan Hayam Wuruk memiliki hubungan dengan Campa (Thailand), Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Ditambah Majapahit sangat unggul di Armada lautnya yang tangguh dibawah pimpinan Mpu Nala, dengan kekuatan tersebut dan strateginya maka tak heran kongsi dagang jalur laut di dominasi oleh Majapahit dan mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya (Rachadian 2010)

Sistem Politik Yang Diterapkan Di Kerajaan Majapahit Di Era Raja Hayam Wuruk

Kerajaan Majapahit merupakan Kerajaan yang mampu menaklukkan Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 M. Kehidupan di sistem politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Kerajaan Majapahit juga disebut sebagai kerajaan nasional Indonesia yang ke dua. Hal tersebut disebabkan oleh upaya yang besar dari kerajaan ini mewujudkan suatu cita-cita yaitu penyatuan Nusantara. Dalam perjalanan Sejarah, upaya integrasi wilayah kepulauan Nusantara memang tidak sepenuhnya berlangsung dengan mulus dan dilakukan dengan cara Ksatria (Kebayatini 2019).

Majapahit telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang menganut doktrin cosmoginos di mana kekuasaan memiliki territorial yang jelas dengan sistem desentralisasi dan birokrasi rigid. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan merupakan penguasa tertinggi dan menduduki puncak hirarki kekuasaan dibantu oleh pejabat birokrasi pemerintahan. Struktur pemerintahan pusat – daerah sangat rapat. Daerah atau desa selalu dipelihara dengan baik karena diposisikan sebagai sumber dan pemasok segala kebutuhan akan pangan (Alit et al. 2022).

Visi politik Majapahit yang mampu mengantarkannya menjadi kerajaan besar yang dihormati rakyatnya dan disegani bangsa lain adalah Sad Guna Upaya (enam upaya luhur) yang harus dikuasai seorang pemimpin adalah sebagai berikut;

1. Sidi Wasesa yaitu seorang pemimpin haruslah bersahabat dengan rakyatnya sendiri.
2. Wigraha Wasesa adalah seorang pemimpin mampu mempertahankan hubungan baik.
3. Wibawa Wasesa adalah seorang pemimpin harus berwibawa dan disegani oleh rakyat, tetangga, dan musuh.
4. Wunaya Wasesa menuntut seorang pemimpin harus cakap dan bijak sehingga memuaskan semua pihak.
5. Gasraya Wasesa menghendaki seorang pemimpin harus mampu menghadapi musuh.

6. Stana Wasesa adalah seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat menjaga hubungan baik dan perdamaian.

Kerajaan majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dalam hal politik dan pemerintahan. Pada umumnya raja memegang kekuasaan tertinggi, sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Slamet Mulyana, sebagai berikut rincian takhta atau jabatan para pemegang takhta di kerajaan Majapahit;

1. Rakryan Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakryan i Hino, Rakryan i Sirikan, dan Rakryan i Halu.
2. Dewan Pelaksana terdiri atas Rakryan Mapatih atau Patih Mangkabumi, Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Ranga dan Rakryan Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca ring Wilwatika.

Rakryan Mapatih atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting di antara kelima pejabat tersebut. Ia menduduki tempat sebagai perdana menteri. Bersama raja, Patih Mangkubumi menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat juga dewan pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu. Struktur kekuasaan tersebut ada di pemerintah pusat. Di setiap daerah yang berada di bawah raja-raja, dibuatkan pula struktur yang mirip (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005).

Majapahit mengikuti era kemaharajaan Thalaskrasi saat penguasa negara Gadjah Mada, berberapa negara anggota di luar negeri juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit, menjadi produksinya, konsep teritorial yang bertambah agung pun terbentuk :

1. Negara Luhur, atau Negara Utama, inti kerajaan. Area permulaan Majapahit atau Majapahit Lama selama masa pembentukannya sebelum mengikuti era kemaharajaan. Yang termasuk area ini adalah ibukota kerajaan dan wilayah bertambah kurangnya dimana raja secara efektif menjalankan penguasa negaranya. Area ini mencakup sebagian anggota timur Jawa, dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bhre (bangsawan), yang merupakan kerabat dekat raja.
2. Mancanegara, area yang melingkupi Negara Luhur. Area ini secara terus dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa, dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi, area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi, yang kemungkinan membangun persekutuan atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan pegawainya di tempat-tempat ini dan mengatur acara perdagangan luar negeri mereka dan menghimpun pajak, namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup agung. Wilayah Mancanegara termasuk didalamnya seluruh kawasan Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pagaruyung, Lampung dan Palembang di Sumatra.

3. Nusantara, adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka wajib membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup luas dan kebebasan internal, dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini; akan tetapi, tantangan apa pun yang terlihat mengancam ketuanan Majapahit atas wilayah itu akan menuai reaksi keras. Termasuk dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya.

Ketiga kategori itu datang ke dalam lingkaran pengaruh Kerajaan Majapahit. Akan tetapi Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang diberikan definisi menjadi hubungan diplomatik luar negeri:

Mitreka Satata, yang secara harafiah artiannya "mitra dengan tatanan (aturan) yang sama". Hal itu memandukan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit, bukan menjadi bawahan dalam kemampuan Majapahit. Menurut Negarakertagama pupuh 15, bangsa asing adalah Syangkayodhyapura (Ayutthaya di Thailand), Dharmmanagari (Kerajaan Nakhon Si Thammarat), Marutma, Rajapura dan Sinhanagari (kerajaan di Myanmar), Kerajaan Champa, Kamboja (Kamboja), dan Yawana (Annam). Mitreka Satata dapat dianggap menjadi aliansi Majapahit, karena kerajaan asing di luar negeri seperti China dan India tidak termasuk dalam kategori ini meskipun Majapahit telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini.

Pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini selanjutnya diidentifikasi oleh sejarawan modern menjadi "mandala", yaitu kesatuan yang politik dipikirkan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif bertambah lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit, yaitu wilayah Mancanegara dan Nusantara, umumnya memiliki pimpinan asli penguasa kawasan tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit-banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem penguasa negaranya sendiri tanpa terintegrasi bertambah lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta mandala-mandala tetangga Majapahit yang sezaman; Ayutthaya dan Champa (Dellios 2003).

Pelaksanaan Program Politik di Kerajaan Majapahit (Era Hayam Wuruk)

Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada pemerintahan raja Hayam Wuruk. Bahkan kekuasaannya mencapai ke berberapa negara lain di Asia Tenggara. Selain itu karya sastra juga mengalami hal yang pesat. Kemakmuran juga dilihat dari majunya pertanian di lembah sungai brantas dan juga jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Perkembangan ekonomi

makin kompleks, kebutuhan akan uang receh juga semakin meningkat dan raja harus mengimpor keping perunggu dari Tiongkok.

Meski kegiatan ekonomi begitu maju, pada 1357 M terjadi perang Bubat. Setelah peristiwa tersebut Raja Hayam Wuruk kemudian meninggal. Sepeninggalnya raja Hayam Wuruk, kondisi Kerajaan Majapahit semakin melemah. Banyak daerah yang melepaskan diri dari Majapahit, karena banyaknya peperangan perebutan kekuasaan di antara keturunan selanjutnya. Sampai akhirnya Majapahit dikuasai oleh Kerajaan Demak (Yusuf Adam 2013).

Pelaksanaan Program Politik ini diawali dengan kepemimpinan Hayam Wuruk (1350-1389 Masehi), dengan diawalinya program ini Kerajaan Majapahit mulai membuka sistem Pemerintahan Politik yang baru dari raja-raja sebelumnya, kemudian mengubah aturan sedikit demi sedikit demi memunculkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan bijaksana (Agus Susilo 2018).

Dari situlah mulai Kerajaan Majapahit mulai membuka sistem Kerjasama antar Kerajaan-kerajaan di Nusantara, Termasuk Sriwijaya, Singosari. Dengan begitu maka sistem politik maupun dagang akan terus berkembang, kerja sama ini dimulai saat diterapkannya program politik yang terbaru (Sofyan 2010). Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat dalam Nagarakertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku. Sehingga memungkinkan kerjasama antar kerajaan-kerajaan berjalan dengan lancar (Prof. Dr. Slamet Muljana 2005).

Selanjutnya terapat beberapa program politik yang diterapkan di Kerajaan majapahit yakni (Prof. Dr. Slamet Muljana 2006):

1. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah disini sama halnya dengan membagi sedikit wilayah ke rakyat yang meminta Gaji atau semacam upeti dengan mendirikan sebuah persatuan untuk membantu melindungi kerajaan dari konflik.

2. Raja

Raja disini berperan sebagai pengatur sistem pemerintahan dan sistem perpolitikan, rakyat hanya bisa memilih dan melihat siapa yang pantas menjadi raja. Dan juga sebagai kalau sekarang disebutnya sebagai Presiden, mengatur semua segala bentuk kerja sama.

3. Adil

Merupakan bentuk Program Politik yang masih dibanggakan rakyat kala itu, dengan raja dan para bawahannya menerapkan sistem ini maka akan terbentuk suatu susunan maupun lingkup kerajaan yang makmur, terbukti majapahit pernah mengalaminya.

4. Menggalakan kejahatan

Menggalakkan Kejahatan dalam artian apapun hal yang bersifat Jahat, menentang, dan ingin berkhianat, maka Raja dan seluruh jajarannya akan menindak hal tersebut seperti peraturan-peraturan yang disusun saat itu, layaknya kalau sekarang UUD, dulu disebut dengan Janji kerajaan.

5. SIMPULAN

Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, kenapa bisa dikatakan demikian, karena bila dilihat dari peninggalan Majapahit yang keseluruhannya berada di Jawa Timur khususnya di Trowulan Mojokerto yang menjadi bukti kongkrit adanya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dalam hal politik dan pemerintahan. Pada umumnya raja memegang kekuasaan tertinggi, sehingga dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Nama Raja – Raja Majapahit yaitu 1. Raden Wijaya (Tahun 1293-1309). 2. Sri Jayanegara (Tahun 1309-1328) 3. Tribhuwana Wijayatunggadewi (Tahun 1328-1350) 4. Hayam Wuruk (Tahun 1350-1398). Setelah Hayam Wuruk meninggal dan digantikan oleh putrinya (Dyah Kusumawardhani) yang didampingi oleh suaminya Wikramawardhana. Pengangkatan Dyah Kusumawardhani.

Mitreka Satata, yang secara harafiah artiannya "mitra dengan tatanan (aturan) yang sama". Hal itu memandukan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit, bukan menjadi bawahan dalam kemampuan Majapahit. Pemerintahan negara Majapahit mempunyai dua bagian pemerintahan, yaitu bagian daerah dan bagian pusat. Bagian daerah pemerintahan Majapahit baik yang berada di darat maupun di pesisir dilaksanakan oleh bupati dan patih. Selain itu ada juga raja atau ratu daerah yang melaksanakan tugas kekuasaan terhadap kecil di bawah wilayahnya, yaitu bagian bawah pemerintahan negara Majapahit dilaksanakan oleh para pejabat yang berada di wilayah pemerintahan desa. Wilayah kekuasaan Majapahit, tercatat dalam Nagarakertagama, meliputi Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur, termasuk Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga sebagian Maluku.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, I. 2012. MAJAPAHIT BATAS KOTA DAN JEJAK KEJAYAAN DI LUAR KOTA. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yoguakarta.
- Agus Susilo, Andriani Sofiarini. 2018. "Kata Kunci : Gajah Mada, Nusantara, Majapahit." 1(1):62–71.
- Alit, D. M., I. N. B. Pramatha, G. S. S. Lewa, and ... 2022. "Negarakeragama: Kisah Keagungan Kerajaan Majapahit." ... Sejarah Dan Ilmu ... 3(1):31–42.

- Andriana Sofiarini, Agus Susilo dan. 2018. "Gajah Mada Sang Mahapatih Pemersatu Nusantara Di Bawah Majapahit Tahun 1336 M-1359 M." Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora Atau KAGANGA 1.
- Dellios, R. 2003. "Mandala : From Sacred Origins to Sovereign Affairs in Traditional Southeast Asia." Centre for East-West Cultural and Economic Studies 13(3):1-6.
- Harry, Srinansy dan Rachadian. 2010. Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Bandung: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Haryono, Timbul. 1997. "Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara Sampai Girindrawarddhana." Humaniora 5.
- Kebayatini, Ni Luh Nyoman. 2019. "MENELUSURI AKAR IDENTITAS BUDAYA POLITIK BANGSA MELALUI SISTEM PEMERINTAHAN RAJA-RAJA." 1-4.
- Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nafisah, Alifa Nur, Moh. Ainin, and Achmad Tohe. 2021. "Pengembangan Kartu Permainan Talk or Dare Untuk Pembelajaran Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas V." JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts 1(6):763-74. doi: 10.17977/um064v1i62021p763-774.
- Prof. Dr. Slamet Muljana. 2005. MENUJU PUNCAK KEMEGAHAN (SEJARAH KERAJAAN MAJAPAHIT). Bantul: LkiS Yogyakarta.
- Prof. Dr. Slamet Muljana. 2006. Tafsir Sejarah NAGARA KRETAGAMA. edited by Khotimatul Husna. yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Purwadi. 2010. The History of Javanese Kings (Sejarah Raja-Raja Jawa). 1st ed. Ragam Media.
- Rachadian, Harry. 2010. Ensiklopedia Kerajaan-Kerajaan Nusantara (Majapahit). Bandung: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Slamet mulyana. 1979. Nagarakertagama XVII.
- Sofyan, Yusef Munawar. 2010. "Kekuasaan Kerajaan Majapahit."
- SYAMSUDDIN, Helius, and Nursam. 2007. Metodologi Sejarah. 2nd ed. Yogyakarta: Yogyakarta Ombak 2007.
- Wahyudi, Deny Yudo. 2013. "Kerajaan Majapahit: Dinamika Dalam Sejarah Nusantara." Ural Sejarah Dan Budaya 7(1):88-95.
- Yusuf Adam. 2013. "Jaman Kuno (Masa Kerajaan-Kerajaan Tertua.Masa Majapahit Dan Sriwijaya Dari AbadVII Sampai Abad XIII Atau XIV."